

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERIKANAN

Tahun 2023





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023. LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu Tahun anggaran. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada Tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ranai, 23 Februari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



MADISURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang telah dicanangkan pada Tahun 2023. Capaian Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna diperhitungkan dengan cara membandingkan antara Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai, akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Untuk Pelaksanaan dan pencapaian target sasaran strategis, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna secara umum melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis pada Tahun 2023 sebagai Indikator Kinerja Utama dan 2 (dua) sasaran strategis sebagai Non Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari



3 (tiga) program sebagai Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) program sebagai Non Indikator Kinerja Utama, serta 5 (enam) kegiatan sebagai Indikator Kinerja Utama dan 6 (enam) kegiatan sebagai Non Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 target sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, meskipun ada beberapa kendala dimana terjadi pergeseran anggaran, sehingga adanya perubahan anggaran baik untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama maupun Non Indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu, perlunya komitmen penuh dari Pimpinan (Kepala Dinas) serta dukungan dan kerjasama pegawai/staf dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2023.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini, digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam perbaikan pelayanan publik di Tahun yang akan datang. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2023, maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 berhasil dan dapat dilaksanakan dengan baik. Diharapkan untuk waktu yang akan datang, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna akan terus melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja dengan meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur dan memaksimalkan anggaran berbasis kinerja.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Organisasi	5
1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan	6
1.6. Sistematika Penyusunan	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. RPJMD Tahun 2021 – 2026	13
2.2. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	16
2.2.1. Visi dan Misi	21
2.2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Realisasi Anggaran	45
BAB IV. PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	55
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel. 1.	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023	8
Tabel. 2.	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023	18
Tabel. 3.	Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023	20
Tabel. 4.	Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV dan Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	23
Tabel. 5.	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	26
Tabel. 6.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	27
Tabel. 7.	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	27
Tabel. 8.	Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2023	30
Tabel. 9.	Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 ..	30
Tabel. 10.	Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun 2023	31
Tabel. 11.	Data Produksi Perikanan Budidaya Per Kecamatan Tahun 2023	32
Tabel. 12.	Data Prasarana Budidaya Per Kecamatan Tahun 2023	33
Tabel. 13.	Data Produksi Olahan Produk Perikanan Per Kecamatan Tahun 2023	35
Tabel. 14.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022 – 2023	36
Tabel. 15.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2019 – 2023	36
Tabel. 16.	Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 – 2023	38



Tabel. 17.	Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 – 2023	38
Tabel. 18.	Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan Tahun 2019 – 2023	39
Tabel. 19.	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023	44
Tabel. 20.	Rincian Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023.....	47
Tabel. 21.	Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023	51
Tabel. 22.	Realisasi Program dan Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar. 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan	10



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Grafik. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perikanan Tahun 2023	9
Grafik. 2. Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 – 2023	38
Grafik. 3. Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 – 2023	39
Grafik. 4. Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan Tahun 2019 – 2023	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perikanan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Natuna yang terbentuk pada Tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2001 yang pada saat itu dikenal dengan nama Dinas Kelautan dan Perikanan. Seiring berjalannya waktu dan dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembatasan pengelolaan wilayah laut yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten yang awalnya kewenangan kabupaten 0 – 4 mil laut menjadi 0 mil laut mengakibatkan berubahnya nama Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Perubahan nama menjadi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11), dan pada Tahun 2022 terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana kedudukan Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perikanan.

Konsep *goodgovernance* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) diperlukan pengembangan dan



penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki *stakeholder*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan harus dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten



Natuna didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 62);



9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 306).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan setiap Tahun merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diawali dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026, dan setiap Tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna tersebut.

Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana perolehan keberhasilan atas capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna serta pada akhir periode capaian kinerja yang berhasil diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan;
2. Untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang; dan



3. Untuk dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

a. Dasar Pembentukan

Dinas Perikanan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Natuna yang terbentuk pada Tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2001 yang pada saat itu dikenal dengan nama Dinas Kelautan dan Perikanan. Perubahan nama menjadi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11). Terakhir dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16).

Berdasarkan Peraturan diatas, Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berjalannya tata laksana dan tata kerja kedinasan maka Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Perikanan



c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu sampai Hilir; dan
- d. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Dalam Batas Kewenangan Daerah.

d. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah dijelaskan tentang kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada aturan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- d. Pengelolaan pembudidayaan ikan
- e. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- f. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Jabatan Pelaksana



- b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Jabatan Pelaksana
- 3. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, meliputi :
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana
- 4. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk, meliputi :
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana
- 5. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya :
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana
- 6. UPT Balai Benih Ikan dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah dan komposisi Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berjumlah 81 orang, yang terdiri dari : 4 Orang Gol IV, 32 Orang Gol III, 5 Orang Gol II, 30 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 10 Orang Tenaga Kontrak. Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat dari Tabel 1 dan sumber daya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Grafik 1 serta Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar 1.



TABEL. 1.
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	PT T	S 2	S1	D3	SMA	SUP M	SMP	SD
(1)	(2)	(3)				(4)					(5)						
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Staf PNS	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	2	1	1	2	-	-
	d. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-	-	-
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Fungsional Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap Muda	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS dan PPPK	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	b. Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	c. Calon Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Muda	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Fungsional Pengawas Perikanan Pertama	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	e. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	f. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
6.	Kepala UPT Balai Benih Ikan (BBI)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha BBI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

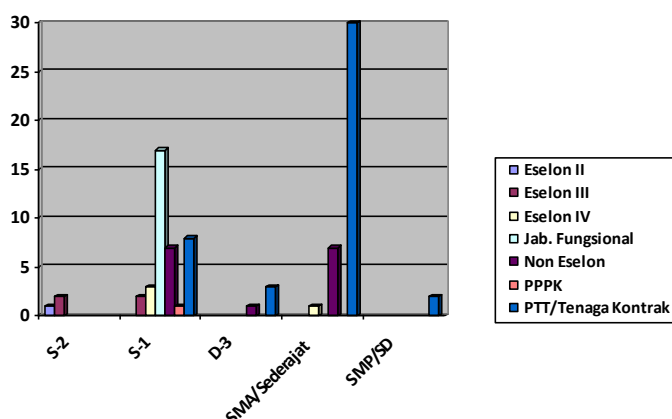


NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	PT T	S 2	S1	D3	SMA	SUP M	SMP	SD
(1)	(2)	(3)				(4)					(5)						
	b. Fungsional Pengawas Perikanan Pertama	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	c. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Calon Fungsional Pengawas Perikanan Pertama	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	e. Calon Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	f. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	g. Staf Non PNS dan Sub Koordinator Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	1	-	17	1	1	-
7.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	9	-	1	-
JUMLAH		-	1	4	4	4	33	5	-	29	3	38	3	36	5	2	-

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Tabel diatas adalah sumber daya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang menjadi pendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 agar berhasil dicapai.

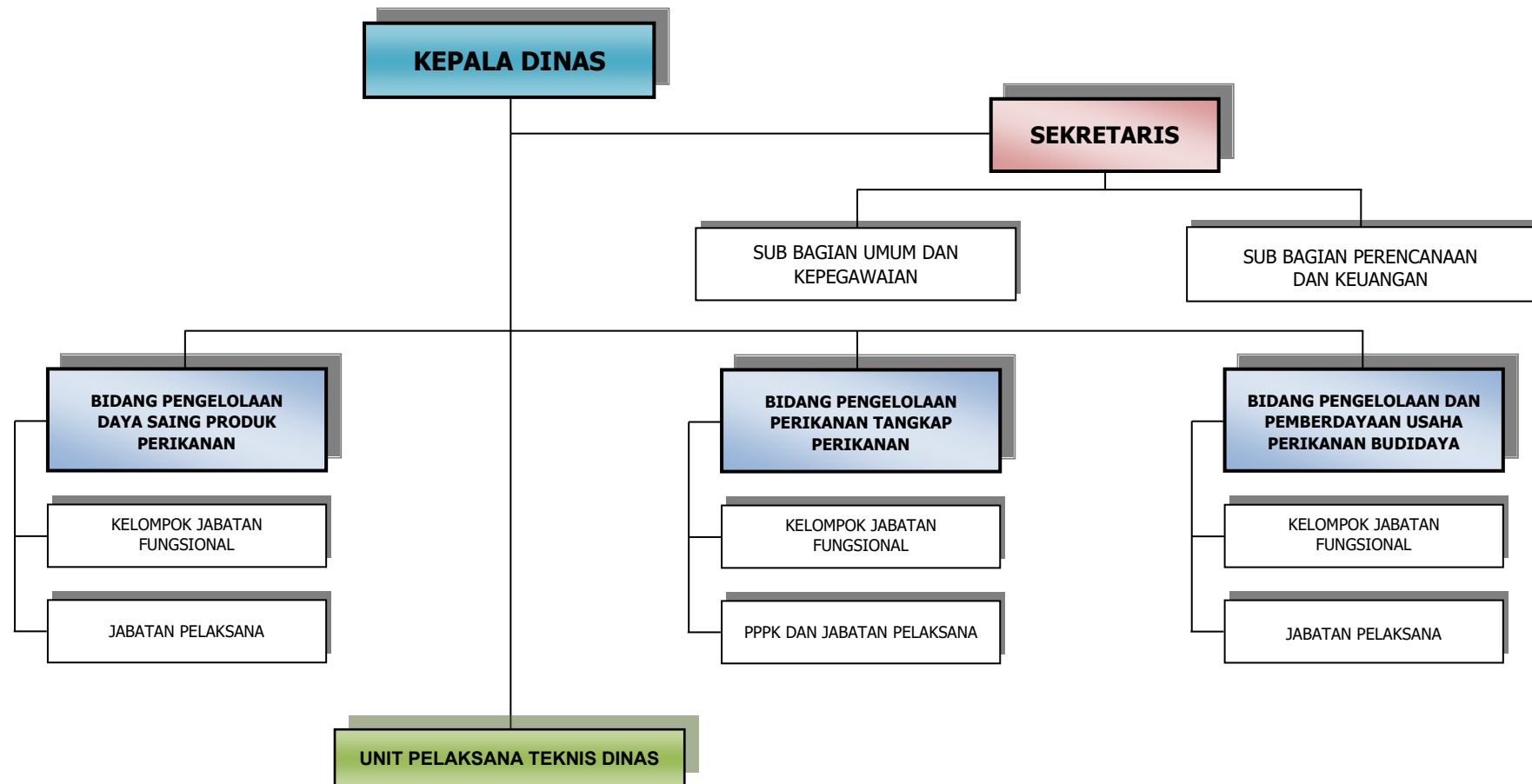
GRAFIK. 1.
GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023



Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023



GAMBAR. 1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA





1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD



2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Tahun 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Maritim yang Unggul

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.



3. Aman

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

4. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

5. Religius

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama

6. Kultural

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut.

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk



berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi. Selain itu juga diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi berbasis ekonomi, industri. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3. Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis

Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi terciptanya natuna sebagai kawasan yang aman, strategis, dan eksotis. Upaya dalam mencapai misi ini adalah melalui pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kontribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan jumlah kapal-kapal nelayan berbendera Indonesia. Sehingga dapat teratasinya kesenjangan pembangunan antar wilayah

4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur

Misi keempat ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang tertib dan teratur, pembangunan sistem transportasi, perluasan konektivitas antar wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi udara

5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi kelima ini menggambarkan terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini diwujudkan dengan terciptanya



kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup dengan sarana, prasarana, yang berwawasan lingkungan, pengawasan terhadap pembangunan, ketersediaan air bersih, dan konservasi alam

6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)

Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintahan mampu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi *stakeholders* dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik

7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara optimal. Adapun misi ini diwujudkan dengan peningkatan konektivitas data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan aplikasi di seluruh kota. Sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sektor

Misi Kabupaten Natuna menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

2.2. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan kerangka acuan (*guard line*) kebijakan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri. Rencana strategis ini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program SKPD.



Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan perencanaan jangka panjang yang perlu dijabarkan dalam perencanaan berjangka pendek dalam satu Tahun berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026. Dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna disebutkan bahwa untuk mendukung pembangunan di bidang perikanan terdapat beberapa program pembangunan dimana urusan Dinas Perikanan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan melalui 4 program untuk Tahun 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dari 4 (empat) program diatas, untuk Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan semua Program meskipun ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan dari 4 (empat) program diatas tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran atau perubahan anggaran yang terjadi pada Tahun 2023.

A. Rencana Kinerja Tahun 2023

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan dan sub kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam Tahun Anggaran 2023 guna mendukung dan mewujudkan program serta sasaran prioritas daerah Kabupaten Natuna, sesuai dengan peran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna



dalam memenuhi misi *Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan Meningkatkan perekonomiannya di sektor Perikanan.*

B. Program Kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan

Secara ringkas rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2023 yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada kurun waktu 5 (lima) Tahun. Target kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2023 merupakan penjabaran dari target Renstra Dinas Perikanan setiap Tahunnya yang harus dicapai sesuai dengan indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahunnya. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi target kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perikanan sebagai berikut :

TABEL. 2.
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan (Ton)	A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	0,51
		1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	18,67
		• Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	20
		2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Unit	0



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	2
		B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persen	1,33
		1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	14
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8
		2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Ton	4.160,68
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	2,00
		1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persen	3,44
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Unit Usaha	10

Tabel diatas menjelaskan tentang target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2023. Target kinerja tersebut terbagi dalam 3 (tiga) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada Tahun 2023. Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian target tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



TABEL. 3.
ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.020.260.750,00
		1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	721.406.750,00
		• Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	721.406.750,00
		2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	298.854.000,00
		• Penetapan Prosedur Pengelolaan dan	298.854.000,00
		B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.326.116.180,00
		1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	17.980.000,00
		• Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	17.980.000,00
		2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.308.136.180,00
		• Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	331.990.000,00
		• Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	976.146.180,00
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	9.039.700,00
		1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	9.039.700,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	9.039.700,00
Jumlah			2.355.416.630,00

Tabel diatas menjelaskan tentang ketersediaan anggaran Dinas Perikanan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terdiri dari 3 (tiga) program sesuai dengan bidang yang ada di Dinas Perikanan. Anggaran tersebut mengalami penurunan karena adanya pergeseran pada APBD perubahan. Meskipun ketersediaan anggaran terbatas, Dinas Perikanan dapat mencapai target kinerja pada Tahun 2023 dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama terutama dalam internal Dinas Perikanan baik Bidang-bidang, UPTD Balai Benih Ikan, Sub Koordinator dan petugas teknis lapangan yang dikoordinir oleh Sub Koordinator masing-masing kecamatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kerjasama juga terjalin antara pihak Dinas dengan Penyuluh Perikanan Bantu dan instransi-instansi terkait lainnya guna mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang atau keinginan kedepan yang diharapkan. Adapun perumusan Visi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut : *“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”*. Dari visi tersebut dapat diartikan bagaimana cara pandang atau keinginan serta harapan kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam membangun dan mendayagunakan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan



masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Dalam mencapai visi tersebut maka Dinas Perikanan kabupaten Natuna menjalankan Misi Bupati Kabupaten Natuna dalam memberi arah kebijakan bagi pembangunan disektor perikanan, adapun misi tersebut adalah misi kedua yaitu *"Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal"*.

Kesatuan visi dan misi dalam pembangunan perikanan memang memerlukan suatu proses yang memakan waktu lama tapi sangatlah diperlukan agar tercapainya kesinambungan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat nelayan.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi. Selain itu tujuan juga merupakan hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu atau jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) Tahun. Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur serta hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu Tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran strategis yang diharapkan untuk dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan;
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, serta merupakan patokan dalam pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Kepala Dinas Perikanan Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Di dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 telah disusun secara berjenjang sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsi yang ada serta sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan yang dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

TABEL. 4.
PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III DAN IV
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas			
1	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	139.331,64 Ton
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	427,27 Ton
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas			
1	Terselenggaranya Akuntabilitas Dinas	Nilai Akuntabilitas	77 Nilai
2	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Layanan Administrasi Umum	85 Persen
3	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan			
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Kinerja	3 Dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dinas	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	1 Laporan
4	Terlaksananya Penatausahaan Aset Dinas	Jumlah Rekonsiliasi Aset Bulanan	12 Dokumen
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelayanan	12 Dokumen
3	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana	12 Dokumen
4	Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan	12 Laporan
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap			
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	135.170,96 Ton
2	Terselenggaranya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Nelayan Terfasilitasi	18,67 Persen
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1 Dokumen
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya			
1	Meningkanya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	4.160,68 Ton
2	Terselenggaranya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Budidaya yang terbina	8 Kelompok
3	Tersedianya Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah prasarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	3 Unit
4	Tersedianya Sarana Budidaya Perikanan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	2 Unit
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan			
1	Meningkatnya Produksi Olahan	Volume Produk Olahan Hasil	427,27 Ton



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
	Produk Perikanan	Perikanan	
2	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	3,44 Persen
3	Meningkatnya penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	2 UPI
Perjanjian Kinerja UPTD Balai Benih Ikan			
a	Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Balai Benih Ikan		
1	Meningkatnya Ketersediaan Benih Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	30.000 Ekor
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan UPT	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Disediakan	2 Unit
b	Perjanjian Kinerja Kepala Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan		
1	Tersusunnya Bahan Rencana Kerja UPT Balai Benih Ikan	Jumlah Dokumen Kinerja	1 Dokumen
2	Tersediannya Draft Laporan UPT Balai Benih Ikan	Jumlah Draft Laporan	16 Laporan

Tabel diatas menjelaskan secara singkat tentang sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam perjanjian kinerja pejabat eselon II, III, dan IV di Dinas Perikanan pada Tahun 2023. Dalam mendukung capaian kinerja Kepala Dinas, para pejabat eselon III dan IV serta dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana dinas harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja pejabat eselon II, III dan IV secara rinci dapat dilihat pada lampiran LKjIP Tahun 2023.

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja Tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama merupakan implementasi dari pernyataan misi, tujuan dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Selain itu penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang



ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, serta Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, dimana penjabaran dari tujuan secara terukur yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu Tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah disajikan pada Tabel 4.

TABEL. 5.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERIODE RPJMD	TARGET INDIKATOR SASARAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					TAHUN - 1	TAHUN - 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	132.632,62	134.481,33	135.170,96	136.700,23	137.818,24	138.886,88	138.886,88
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.045,40	4.106,68	4.160,68	4.221,36	4.282,04	4.342,72	4.342,72
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	410,69	418,90	427,27	435,81	444,52	453,41	453,41

Sumber : Renstra Dinas Perikanan 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen



penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah disajikan pada Tabel II.5.

TABEL. 6.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	IKU	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	1. Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Produksi Perikanan yang dihasilkan dalam 1 (satu) Tahun	139.331,64
		2. Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Produksi Olahan Produk Perikanan yang dihasilkan dalam 1 (satu) Tahun	427,27

Sumber : Kumpulan Indikator kinerja Utama satuan kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan bertanggungjawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Dimana target kinerja diatas merupakan target Renstra Dinas Perikanan setiap tahunnya yang dijabarkan pada Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023.

TABEL. 7.
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	IKU	INDIKATOR SASARAN	ALASAN PENGGUNAAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	1. Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Total Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Total Jumlah Produk Perikanan Olahan	Dinas Perikanan
		2. Produksi Olahan Produk Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Total Jumlah Produk Perikanan Olahan	Dinas Perikanan

Sumber : Kumpulan Indikator kinerja Utama satuan kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023



Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja Tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama adalah implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna dimana dalam pelaksanaannya dinas pada kurun waktu 5 (lima) Tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai dengan cara melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan yang digagas oleh pemerintah turut mendukung tercapainya realisasi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di bidang perikanan, yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2023. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur melalui capaian sasaran dengan indikator sasaran serta capaian kegiatan dengan indikator kinerja.

A. Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan. Dalam laporan pengukuran kinerja ini diuraikan kinerja Program dan Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023. Analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 yang mencakup 2 (dua) sasaran strategis telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 yang disajikan berdasarkan sistematika pernyataan Misi Bupati pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Misi 2	:	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Tujuan	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Sasaran	:	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan



TABEL. 8.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	139.331,64	139.468,64	100,09
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	427,27	434,58	101,71

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dimana persentase produksi perikanan pada Tahun 2023 mencapai 100,09%. Tercapainya target jumlah produksi perikanan dipengaruhi oleh jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap dan jumlah alat tangkap yang digunakan, adanya bantuan alat bantu penangkapan ikan dan adanya penambahan jumlah RTP Budidaya, serta adanya bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. Data jumlah produksi perikanan diatas merupakan penjumlahan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya Tahun 2023.

Untuk indikator kinerja sasaran jumlah produksi olahan produk perikanan juga melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 101,71%. Tercapainya target jumlah produksi olahan produk perikanan salah satunya dipengaruhi oleh tingginya produksi dari jenis olahan ikan teri/bilis. Jumlah produksi tersebut merupakan laporan produksi dari bidang yang diperoleh dari sub koordinator Dinas Perikanan yang ada di kecamatan. Secara detail jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL. 9.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP, JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN JUMLAH PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	135.170,96	135.171,42	100,00



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.160,68	4.297,22	103,28
3.	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	427,27	434,58	101,71

Selain melihat tingkat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan, pengukuran atau capaian kinerja Dinas Perikanan juga diukur dengan membandingkan realisasi pada Tahun 2022 dengan realisasi Tahun 2023. Perbandingan realisasi ini diharapkan dapat melihat peningkatan jumlah produksi perikanan yang telah dicapai, sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk meningkatkan produksi perikanan di tahun-tahun selanjutnya. Jumlah produksi yang disajikan pada **Tabel 9** di atas diperoleh dari tiap-tiap bidang yang membidangi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan Pengolahan hasil perikanan.

Berikut juga disajikan data nilai produksi perikanan dari tiap-tiap kecamatan pada Tahun 2023 :

TABEL. 10.
DATA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PER KECAMATAN
TAHUN 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Jumlah Armada (Unit)	Jumlah Alat Tangkap Ikan (Unit)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunguran Barat	784	566	6.619	17.947,29
2	Bunguran Selatan	747	273	3.747	9.325,50
3	Bunguran Tengah	0	0	0	0,00
4	Bunguran Timur	697	532	5.259	16.306,97
5	Bunguran Timur Laut	644	451	3.796	11.533,35
6	Bunguran Utara	281	216	2.852	8.915,30
7	Midai	174	296	1.793	5.864,88
8	Pulau Laut	342	416	570	4.926,76
9	Pulau Tiga	337	366	400	4.872,28
10	Pulau Tiga Barat	131	145	817	6.883,12



No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Jumlah Armada (Unit)	Jumlah Alat Tangkap Ikan (Unit)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Serasan	592	506	2.020	10.068,59
12	Serasan Timur	271	233	2.025	8.825,84
13	Subi	344	308	2.671	10.789,32
14	Suak Midai	82	134	860	2.882,71
15	Bunguran Batubi	254	120	573	3.617,22
16	Pulau Panjang	90	91	1.237	7.625,17
17	Seluan	79	99	1.140	4.787,12
Jumlah Th. 2023		5.849	4.752	36.379	135.171,42
Jumlah Th. 2022		5.658	4.593	36.215	134.874,54

Sumber : Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2023

Tabel diatas merupakan data produksi perikanan tangkap, jumlah RTP, jumlah armada dan jumlah alat tangkap pada Tahun 2023 ditiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, selain itu juga menjelaskan perbandingan antara Tahun 2022 dan Tahun 2023.

TABEL. 11.
DATA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA PER KECAMATAN
TAHUN 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP)	Prod. Budidaya Ikan Laut (Ton)	Prod. Budidaya Ikan Air Tawar (Ton)	Prod. Budidaya Air Payau (Ton)	Total Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bunguran Timur	83	47,81	583,72	0,00	631,53
2	Bunguran Timur Laut	39	23,45	52,85	0,00	76,30
3	Bunguran Selatan	20	21,48	0,00	0,00	21,48
4	Bunguran Tengah	67	0,00	581,28	0,00	581,28
5	Bunguran Barat	132	1.637,62	0,00	0,00	1.637,62
6	Bunguran Utara	34	68,48	103,87	0,00	172,35
7	Pulau Tiga	36	758,66	0,00	0,00	758,66
8	Pulau Laut	20	35,22	0,00	0,00	35,22
9	Midai	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Subi	30	63,41	0,00	0,00	63,41
11	Serasan Timur	21	41,57	0,00	0,00	41,57
12	Serasan	35	66,63	0,00	0,00	66,63



No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP)	Prod. Budidaya Ikan Laut (Ton)	Prod. Budidaya Ikan Air Tawar (Ton)	Prod. Budidaya Air Payau (Ton)	Total Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
13	Pulau Tiga Barat	33	89,88	0,00	0,00	89,88
14	Bunguran Batubi	37	0,00	112,33	0,00	112,33
15	Pulau Panjang	15	5,04	0,00	0,00	5,04
16	Seluan	16	3,92	0,00	0,00	3,92
Jumlah Th. 2023		618	2.863,17	1.434,05	0,00	4.297,22
Jumlah Th. 2022		598	3.485,49	678,62	100,00	4.264,11

Sumber : Data Produksi Perikanan Budidaya Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2022 - 2023

Tabel diatas merupakan data produksi perikanan budidaya, jumlah RTP budidaya, dan jumlah produksi per jenis komoditi ikan budidaya Tahun 2023, serta perbandingannya dari Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selain data produksi perikanan budidaya, dibawah ini juga disajikan data prasarana budidaya per kecamatan.

TABEL. 12.
DATA PRASARANA BUDIDAYA PER KECAMATAN
TAHUN 2023

No	Kecamatan	Sarana Prasarana Budidaya					
		KJA	KJT	Kolam	UPR	Bioflok	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bunguran Timur	10	62	120	1	1	194
2	Bunguran Timur Laut	0	87	20	0	0	107
3	Bunguran Selatan	0	60	3	0	0	63
4	Bunguran Tengah	0	69	195	1	0	265
5	Bunguran Barat	80	402	0	0	0	482
6	Bunguran Utara	0	48	100	1	0	149
7	Pulau Tiga	0	164	0	0	0	164
8	Pulau Laut	0	36	60	0	0	96
9	Midai	0	108	0	0	0	108
10	Subi	30	88	0	0	0	118
11	Serasan Timur	80	54	0	0	0	134
12	Serasan	60	106	0	0	0	166
13	Pulau Tiga Barat	90	188	0	0	0	278
14	Bunguran Batubi	0	63	90	0	0	153
15	Pulau Panjang	43	121	0	0	0	164
Jumlah Th. 2023		393	1.656	588	3	1	2.641
Jumlah Th. 2022		18	996	517	3	1	1.535



Sumber : Data Prasarana Budidaya Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2022-2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa prasarana budidaya yang lebih dominan digunakan oleh pembudidaya ikan adalah Keramba Jaring Tangkap (KJT) untuk budidaya ikan air laut, sedangkan untuk budidaya ikan air tawar, pembudidaya ikan lebih memilih menggunakan kolam. Untuk meningkatkan angka produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan telah memberikan bantuan prasarana budidaya seperti pembangunan prasarana budidaya sistem bioflok dan hatchery skala rumah tangga (HSRT) pada tahun 2021, pembangunan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan bantuan kolam tradisional pada Tahun 2022 serta bantuan prasarana budidaya ikan laut dan bibit ikan kerapu pada Tahun 2023.



TABEL. 13.
DATA PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN PER KECAMATAN
TAHUN 2023

No	Kecamatan	Jenis Olahan (Kg)																						Jumlah Produksi
		Kerupuk Ikan	Kerupuk Atom	Bakso Ikan	Empek-empek	Otak-otak ikan	Kernas	Cincalok	Tabel Mando	Tamban Presto	Ikan Bilis/ Teri	Ikan Asin	Ikan Salai	Pedek	Abon Ikan	Kerupuk Cumi	Ikan Giling	Keripik Bilis	Daging Fillet Rajungan	Sosis Ikan	Nugget Ikan	Cumi Kering	Terasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Midai	2.429,00	720,00	126,00	99,00	38,00	-	-	-	-	765,00	345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.522,00
2	Subi	119,00	133,70	67,90	-	-	-	-	-	-	171,50	186,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678,30
3	Bunguran Barat	2.207,00	2.217,00	1.554,00	-	-	-	177,00	-	-	185.629,00	527,00	2.214,00	-	269,00	-	4.185,00	-	-	-	-	-	167,00	194.961,00
4	Pulau Laut	722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.172,00
5	Pulau Tiga	12.656,00	6.578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.544,00
6	Pulau Tiga Barat	8.479,00	537,00	-	-	-	-	-	-	-	3.080,00	550,00	-	-	-	815,00	120,00	-	-	-	-	-	-	13.581,00
7	Serasan	2.665,00	-	1.237,00	-	-	-	-	-	-	-	1.062,00	-	-	420,00	-	1.570,00	-	-	320,00	400,00	-	-	7.674,00
8	Serasan Timur	2.131,00	-	1.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.276,00
9	Bunguran Timur	9.579,00	23.118,00	10.610,00	1.506,00	-	1.120,00	-	169,00	-	1.875,00	-	45.662,00	31,00	263,00	120,00	-	-	5.834,00	-	-	-	-	99.887,00
10	Bunguran Selatan	190,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	4.516,00	500,00	-	1.905,00	-	-	-	57,00	-	-	-	-	-	7.172,00
11	Bunguran Timur Laut	520,00	-	1.027,00	968,00	-	1.788,00	-	-	-	47.992,00	-	-	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	52.393,00
12	Bunguran Utara	183,40	-	165,90	-	-	-	-	-	-	8.151,50	413,00	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.011,80
13	Bunguran Tengah	523,00	-	1.057,00	435,00	-	-	-	-	-	-	1.325,00	795,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.190,00
14	Bunguran Batubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.165,00
15	Suak Midai	160,00	-	245,00	-	-	-	-	-	-	2.214,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,00	-	3.204,00
16	Pulau Panjang	51,00	57,30	29,10	-	-	-	-	-	-	73,50	79,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,70
17	Seluan	78,60	-	71,10	-	-	-	-	-	-	3.493,50	177,00	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.862,20
Jumlah Th. 2023		42.692,80	33.361,00	17.339,30	3.008,00	38,00	2.908,00	177,00	169,00	-	264.411,00	6.735,00	50.976,00	1.936,00	1.105,00	935,00	1.690,00	57,00	5.834,00	320,0	400,00	325,00	167,00	434.583,70
Jumlah Th. 2022		53.720,00	12.887,00	22.588,00	1.163,00	150,00	1.591,00	-	88,00	164,00	381.341,00	11.343,00	30.944,00	2.720,00	1.918,00	1.488,00	-	-	4.185,00	-	-	-	-	526.289,65

Sumber : Data Produksi Olahan Produk Perikanan Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2022-2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai produksi olahan produk perikanan pada Tahun 2023 masih didominasi oleh ikan bilis/teri, hal ini dipengaruhi oleh jumlah armada yang meningkat pada perikanan tangkap, terutama armada tangkap bagan perahu yang beroperasi menggunakan alat tangkap serok.



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk melihat sejauhmana capaian kinerja Dinas Perikanan perlu adanya perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 serta perbandingan capaian kinerja Dinas Perikanan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran dari kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023. Maka dijabarkan sebuah tabel perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2023 dengan beberapa Tahun terakhir sebagai berikut :

TABEL. 14.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	139.138,66	139.468,64
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	526,29	434,58

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 pada indikator kinerja jumlah produksi perikanan sebesar 0,24%. Sedangkan untuk realisasi indikator kinerja sasaran jumlah produksi olahan produk perikanan meskipun mengalami penurunan realisasi dari Tahun 2022, target kinerja Tahun 2023 tercapai. Dibawah ini juga disajikan tabel perbandingan yang menyajikan target dan realisasi produksi perikanan yang menjadi target kinerja Dinas Perikanan per 5 (lima) tahun.

TABEL. 15.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2019 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan	Ton	107.234,44	105.146,65	2019
				121.880,42	124.310,81	2020



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				136.526,44	136.678,02	2021
				138.587,41	139.138,66	2022
				139.331,64	139.468,64	2023
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	129,79	92,69	2019
				129,79	139,74	2020
				149,65	410,69	2021
				418,90	526,29	2022
				427,27	434,58	2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra 2021 – 2026. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menargetkan jumlah produksi perikanan pada Tahun 2023 adalah sebesar 139.331,64 Ton, dimana angka tersebut merupakan target dari jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 135.170,96 Ton dan target jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 4.160,68 Ton. Pada Tahun 2023 capaian jumlah produksi perikanan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dimana perbandingan antara target dan realisasi produksi perikanan dapat dilihat pada tabel diatas. Selain dari jumlah produksi perikanan, tabel diatas juga menjelaskan perbandingan antara target dan realisasi produksi olahan produk perikanan dimana realisasi produksi olahan produk perikanan juga telah melebihi target pada Tahun 2023. Untuk melihat perbandingan antara target dan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan produksi olahan produk perikanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



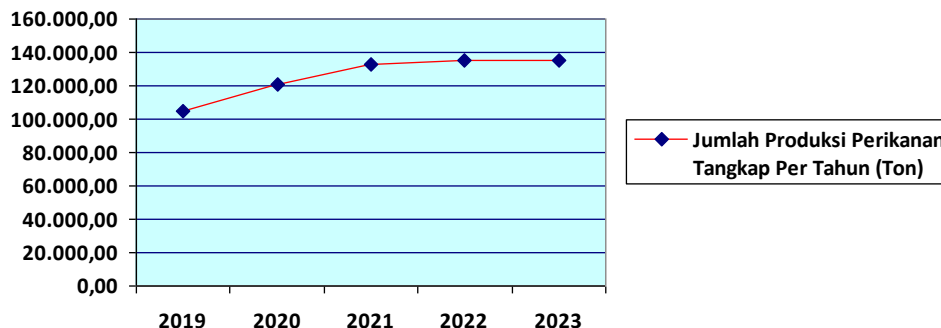
TABEL. 16.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2019 – 2023

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	104.541,62	104.879,81	2019
			118.541,62	120.583,25	2020
			132.541,62	132.632,62	2021
			134.481,33	134.874,54	2022
			135.170,96	135.171,42	2023

Sumber : Data Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tabel diatas menyajikan data target dan realisasi produksi perikanan tangkap untuk periode 2019 – 2023. Besarnya kenaikan produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 2.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2019 – 2023



TABEL. 17.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2019 – 2023

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.692,82	266,84	2019
			3.338,80	3.727,56	2020
			3.984,82	4.045,40	2021
			4.106,08	4.264,11	2022

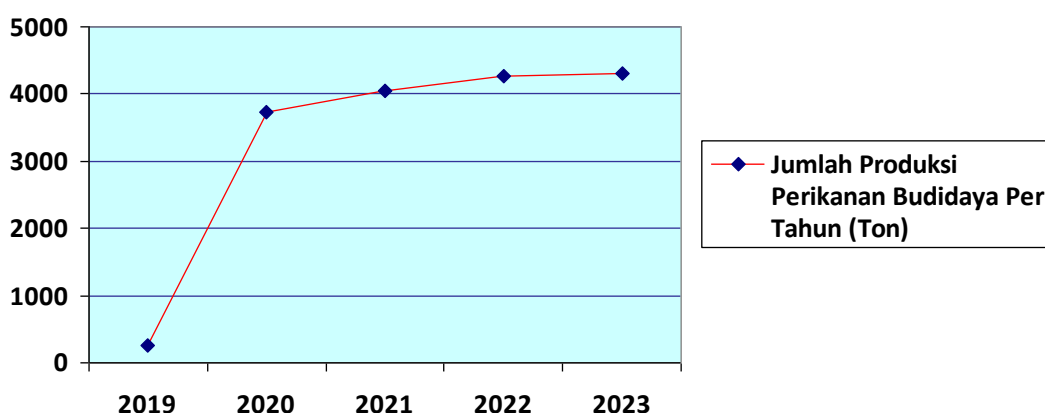


NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4.160,68	4.297,22	2023

Sumber : Data Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya

Tabel diatas menyajikan data target dan realisasi produksi perikanan budidaya untuk periode 2019 – 2023. Besarnya kenaikan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GRAFIK. 3.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2019 – 2023



TABEL. 18.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN TAHUN 2019 – 2023

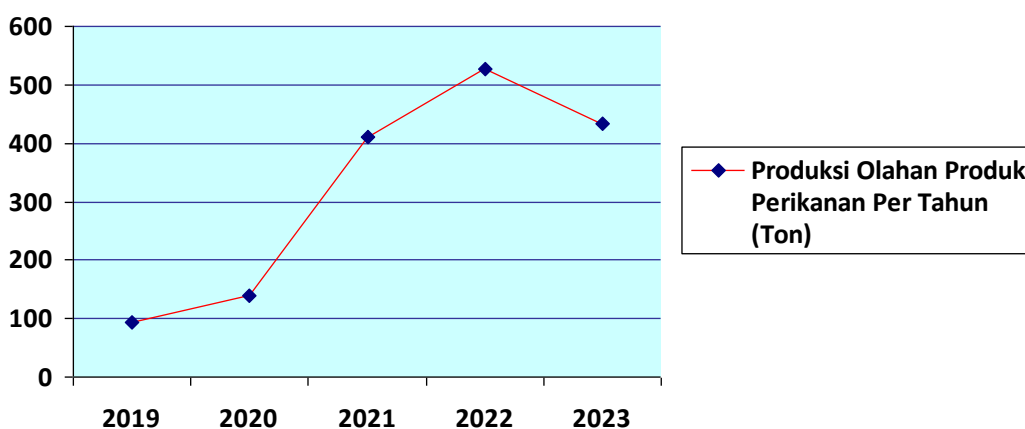
NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	129,79	92,69	2019
			129,79	139,74	2020
			149,65	410,69	2021
			418,90	526,29	2022
			427,27	434,58	2023

Sumber : Data Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan

Tabel diatas menyajikan data target dan realisasi produksi perikanan budidaya untuk periode 2019 – 2023. Besarnya kenaikan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



GRAFIK. 4.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
OLAHAN PRODUK PERIKANAN TAHUN 2019 – 2023



C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2023 yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa jumlah produksi perikanan (jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya) dan jumlah produksi olahan produk perikanan. Pada sasaran meningkatnya ekonomi sektor perikanan dengan indikator jumlah produksi perikanan, capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100,09% dengan jumlah 139.468,64 Ton, sedangkan jumlah produksi olahan produk perikanan capaian kinerja sebesar 101,71% dengan jumlah produksi sebesar 434,58 Ton. Kedua indikator kinerja yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Dalam mendukung keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023, ada 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, serta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dimana program tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2023. Anggaran pendukung yang tersedia dari 3 program tersebut mengalami perubahan pada PAPBD sehingga ada beberapa kegiatan



yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pergeseran, sehingga dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan harus melakukan beberapa alternatif atau solusi supaya target kinerja yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Dalam mencapai keberhasilan kinerja tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang sering muncul dalam mencapai keberhasilan kinerja yang dilakukan setiap Tahunnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi serta kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan/Faktor Penghambat

- Kurangnya armada penangkapan ikan yang memiliki tonase yang besar.
- Masih rendahnya keterampilan dan keahlian nelayan lokal.
- Penggunaan alat tangkap yang masih tradisional.
- Kurangnya ketersediaan SPDN/SPBUN di kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kabupaten.
- Lemahnya akses permodalan usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Belum optimalnya pengelolaan atau pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang ada.
- Kurangnya ketersediaan pabrik es dan cold storage di beberapa kecamatan.
- Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan.
- Masih maraknya pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tetangga.
- Kurangnya keahlian bagi pelaku usaha budidaya.
- Belum adanya penerapan penggunaan benih/bibit ikan yang berstandar Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
- Tingginya ketergantungan pembudidaya terhadap bibit (ikan laut) alam.



- Belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya perikanan.
- Sulitnya akses pemasaran produk olahan perikanan.
- Tingginya biaya produksi produk olahan perikanan.
- Kurangnya minat pelaku usaha perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) untuk membentuk kelompok dalam menjalankan usaha.

2. Faktor Pendukung

- Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberian dana yang memadai. Banyak program yang diluncurkan dalam usaha memajukan sektor kelautan dan perikanan seperti :
 - Program SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang merupakan program yang sangat besar untuk membangun pelabuhan perikanan beserta seluruh fasilitas pendukung kepelabuhanan;
 - Penetapan Kawasan Kampung Nelayan Maju (KALAJU)
 - Penetapan Kawasan Kampung Perikanan Budidaya (KPB)
 - Penetapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)
- Adanya dukungan dari instansi – instansi terkait sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat berjalan baik;
- Adanya bantuan sarana dan prasarana usaha kelautan dan perikanan yang bersumber dari Provinsi dan Pusat;
- Peran Penyuluh Perikanan Bantu, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah hasil perikanan. Aktifitas para penyuluh yang sehari-hari mendampingi masyarakat di lapangan sangat membantu dalam meningkatkan usaha mereka dalam mengolah sumberdaya alam yang ada. Selain pendampingan usaha, para penyuluh juga mendampingi masyarakat dalam berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha.
- Besarnya potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Natuna.



3. Solusi/Alternatif Yang Dapat Dilakukan

- Perlunya armada penangkapan ikan dengan kapasitas tonase yang besar.
- Perlunya pelatihan keahlian dan keterampilan bagi nelayan lokal sehingga dapat bersaing dengan nelayan dari luar.
- Perlu adanya modernisasi alat tangkap untuk nelayan tradisional.
- Perlunya SPDN/SPBUN disetiap kecamatan.
- Memberikan kemudahan akses permodalan dan penguatan kemitraan usaha.
- Mengembangkan pola penangkapan ikan berbasis *fishing ground* atau Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dan pengembangan investasi perikanan tangkap di sentra perikanan.
- Penyediaan sarana dan prasarana pabrik es di beberapa kecamatan.
- Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang terhadap pemberantasan pelaku *illegal fishing*.
- Mengadakan pelatihan CBIB bagi pembudidaya ikan.
- Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) ikan air laut.
- Perlunya pengembangan potensi budidaya perikanan berbasis kawasan.
- Penyediaan sarana dan prasarana *cold storage* di beberapa kecamatan.
- Fasilitasi pameran produk olahan hasil perikanan ke luar daerah untuk mempromosikan ragam dan jenis produk olahan unggulan perikanan Kabupaten Natuna.
- Bimbingan teknis pemasaran produk olahan hasil perikanan berbasis online marketplace atau website online.
- Melaksanakan bimbingan teknis penerapan cara pengolahan ikan yang baik bagi UMKM/Pengolah Hasil Perikanan melalui kegiatan peningkatan mutu nilai tambah dan diversifikasi usaha.
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada Kelompok dan sosialisasi serta fasilitasi perizinan usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023, anggaran untuk program dan kegiatan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebesar Rp. 10.402.614.584. Dari alokasi tersebut pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 2.355.416.630. Dari pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Produksi Perikanan sebesar Rp. 2.346.376.930 sedangkan untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan sebesar Rp. 9.039.700. Kecilnya pagu anggaran Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan dikarenakan adanya refocusing atau pergeseran anggaran yang terjadi pada PAPBD Tahun 2023. Meskipun demikian, tidak menyurutkan semangat dan langkah Dinas Perikanan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun, dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada dan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya sebaik mungkin. Berikut akan dijelaskan efisiensi penggunaan sumber daya melalui tabel matriks sebagai berikut :

TABEL. 19.
TINGKAT EFISIENSI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	100,09	67,88	32,12
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	101,71	84,33	15,67

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari sasaran strategis yang terdiri dari dua indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna memiliki hasil yang baik, hal ini dapat dilihat pada tingkat capaian efisiensi yang tinggi pada indikator kinerja sasaran jumlah produksi perikanan yang merupakan akumulasi atau



penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dan produksi budidaya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,09% dan capaian anggaran 67,88%, dimana tingkat efisiensinya sebesar 32,12%. Sedangkan tingkat capaian kinerja jumlah produksi olahan produk perikanan mencapai 101,71% dan capaian anggaran 84,33%, dengan tingkat efisiensinya sebesar 15,67%.

E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Tahun 2023 Dinas Perikanan memiliki 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan untuk mendukung sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran jumlah produksi perikanan yaitu : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sedangkan untuk indikator kinerja sasaran jumlah produksi olahan produk perikanan yaitu : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Ketiga program tersebut memiliki kegiatan yang berdampak langsung dalam pencapaian target kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2023. Meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dijalankan atau dilaksanakan karena adanya refocusing atau pergeseran anggaran yang terjadi pada PAPBD Tahun 2023, target kinerja Dinas Perikanan dapat tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kerjasama terutama dalam internal Dinas Perikanan baik Bidang-bidang, UPTD Balai Benih Ikan, Sub Koordinator dan petugas teknis lapangan yang dikoordinir oleh Sub Koordinator masing-masing kecamatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kerjasama juga terjalin antara pihak Dinas dengan Penyuluh Perikanan Bantu dan instransi-instansi terkait lainnya guna mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pencapaian misi strategis yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada Tahun 2023 seperti terlihat pada Tabel III.12.



Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 2 sasaran utama, dengan 1 program non IKU dan 3 program yang mendukung IKU, serta 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan anggaran belanja operasi sebesar Rp. 9.882.414.584,00 dan belanja modal Rp. 520.200.000,00 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 9.404.171.129,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,40% serta sisa anggaran sebesar Rp. 998.433.455,00. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:



TABEL. 20.
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	77 Persen	52.100.000,00	43.795.092,00	84,06
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	77 Persen	52.100.000,00	43.795.092,00	84,06
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	52.100.000,00	43.795.092,00	84,06
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	85 Persen	5.498.263.804,00	5.391.011.730,00	98,05
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	5.498.263.804,00	5.391.011.730,00	98,05
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	5.498.263.804,00	5.391.011.730,00	98,05
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	80 Persen	761.286.850,00	683.643.580,00	89,80
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	104.790.100,00	103.783.892,00	99,04
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	50.000.000,00	49.916.440,00	99,83



NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	25.200.000,00	23.100.000,00	91,67
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 OK	581.296.750,00	506.843.248,00	87,19
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	76 Persen	520.200.000,00	492.007.095,00	94,58
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	57.400.000,00	55.910.000,00	97,40
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	388.800.000,00	372.787.095,00	95,88
	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	74.000.000,00	63.310.000,00	85,55
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	77 Persen	949.254.233,00	931.762.237,00	98,16
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	57.404.000,00	54.812.000,00	95,48
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	8.888.750,00	1.400.500,00	15,76
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	882.961.483,00	875.549.737,00	99,16
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	76 Persen	266.093.067,00	261.558.876,00	98,30
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	222.093.067,00	217.654.876,00	98,00



NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	24.000.000,00	23.965.000,00	99,85
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	19.939.000,00	99,70
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,51 Persen	1.020.260.750,00	298.395.503,00	29,25
	1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	18,67 Orang	721.406.750,00	144.977.760,00	20,10
	- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	721.406.750,00	144.977.760,00	20,10
	2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	0 Unit	298.854.000,00	153.417.743,00	51,34
	- Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	298.854.000,00	153.417.743,00	51,34
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,33 Persen	1.326.116.180,00	1.294.374.016,00	97,61
	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	14 Kelompok	17.980.000,00	16.223.000,00	90,23
	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	17.980.000,00	16.223.000,00	90,23
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.160,68 Ton	1.308.136.180,00	1.278.151.016,00	97,71
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	331.990.000,00	326.542.816,00	98,36



NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Jenis	976.146.180,00	951.608.200,00	97,49
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2 Persen	9.039.700,00	7.623.000,00	84,33
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	3,44 Persen	9.039.700,00	7.623.000,00	84,33
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	9.039.700,00	7.623.000,00	84,33
JUMLAH				10.402.618.584,00	9.404.171.129,00	90,40

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian atau serapan anggaran Dinas Perikanan secara keseluruhan sebesar 90,40% atau dari anggaran yang tersedia. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan juga kegiatan yang sifatnya hanya penyediaan asuransi/jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan, apabila terjadi kematian atau kecelakaan kerja baru bisa terealisasi. Meskipun realisasi anggaran tidak tercapai 100%, pelaksanaan dan capaian target kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kerjasama baik internal Dinas Perikanan maupun dengan pihak lain seperti Penyuluh Perikanan Bantu dan instansi- instansi lainnya yang mendukung tercapainya target kinerja Dinas Perikanan.



TABEL. 21.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.020.260.750	298.395.503	29,25%
	1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	721.406.750	144.977.760	20,10%
	- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	721.406.750	144.977.760	20,10%
	2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	298.854.000	153.417.743	51,34%
	- Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	298.854.000	153.417.743	51,34%
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.326.116.180	1.294.374.016	97,61%
	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	17.980.000	16.223.000	90,23%
	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	17.980.000	16.223.000	90,23%
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.308.136.180	1.278.151.016	97,71%
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	331.990.000	326.542.816	98,36%
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	976.146.180	951.608.200	97,49%
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	9.039.700	7.623.000	84,33%
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	9.039.700	7.623.000	84,33%
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	9.039.700	7.623.000	84,33%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian atau serapan anggaran Dinas Perikanan dari program dan kegiatan yang



mendukung IKU tidak terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan adanya kegiatan yang sifatnya hanya penyediaan asuransi/jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan, yang mana realisasinya tergantung dengan adanya klaim dari nelayan yang mengalami kematian atau kecelakaan kerja.

TABEL. 22.
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	A Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	0,51	1,69
		1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Orang	18,67	0
		- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	20	16
		1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Unit	0	0
		- Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	1
		B Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persen	1,33	5,41
		1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	14	21
		- Pemberian Pendampingan, Kemudahan	Kelompok	8	21



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
		2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Ton	4.160,68	4.297,22
		- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	3	3
		- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	2	2
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	C Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	2	28.15
		1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persen	3,44	5,19
		- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Unit Usaha	10	142

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja Dinas Perikanan terealisasi dengan baik. Tercapainya target kinerja Dinas Perikanan dikarenakan adanya kerjasama baik internal Dinas Perikanan maupun dengan pihak lain seperti Penyuluh Perikanan Bantu dan instansi- instansi lainnya yang mendukung tercapainya target kinerja Dinas Perikanan.



Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Perikanan juga melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu bahan evaluasi atas pelayanan yang diberikan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna di Tahun 2023 adalah 3,50 yang mana nilai tersebut telah mencapai target IKM yang ditetapkan sebesar 3,47.



BAB IV *PENUTUP*

4.1. Kesimpulan

Dinas Perikanan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Natuna. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang perikanan, dilaksanakan melalui rencana strategis dan rencana kinerja Tahun 2023 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form Pencapaian Sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian kinerja organisasi Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Indikator jumlah produksi perikanan merupakan gabungan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya. Dari hasil yang didapat, nilai produksi perikanan baik dari sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya juga menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat capaian produksi perikanan tangkap sebesar 135.171,42 Ton (100,00%) dan perikanan budidaya sebesar 4.297,22 Ton (103,28%) dengan total produksi perikanan sebesar 139.468,64 Ton (100,09 %) dari target yang ingin dicapai sebesar 139.331,64 Ton.
2. Indikator jumlah produksi olahan produk perikanan pada Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik dengan capaian produksi sebesar 434,58 Ton atau sebesar 101,71% dari target yang ingin dicapai sebesar 427,27 Ton.

4.2. Saran

Target Kinerja Dinas Perikanan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi agar kinerja Dinas Perikanan menjadi lebih baik. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling mendukung antara berbagai pihak



yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Ada beberapa faktor dalam bentuk :

1. Dukungan pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas dapat diselenggarakan dengan baik, terarah serta mencapai sasaran yang diinginkan.
2. Dukungan anggaran terutama program dan kegiatan yang mendukung kinerja utama, sehingga pencapaian target dimasa yang akan datang menjadi lebih baik.
3. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi dan kerjasama di masa mendatang.
4. Dukungan dan pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan baik berupa saran serta kritik kepada Dinas Perikanan mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, agar kedepan program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih baik.



LAMPIRAN



DATA CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

N0	Urusan Pemerintahan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai/ Predikat	77,00	77,75	100,97
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	77,00	77,75	100,97
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	2,00	100,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	80,00	100,00	125,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,00	1,00	100,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	48,00	42,00	87,50
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum	Persen	80,00	100,00	125,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10,00	13,00	130,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80,00	134,00	167,50
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persen	78,00	90,78	116,38
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15,00	8,00	53,33
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	27,00	135,00
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	1,00	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan perkantoran	Persen	77,00	100,00	129,87
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12,00	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	38,00	40,00	105,26
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	Persen	77,00	92,41	120,01
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48,00	34,00	70,83
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98,00	38,00	38,78
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	1,00	50,00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0,51	0,51	100,62

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023



N0	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	18,67	28,86	154,58
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	20,00	20,00	100,00
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	1,00	1,00	100,00
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1,00	1,00	100,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1,33	4,66	350,00
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	14,00	21,00	150,00
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8,00	21,00	262,50
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budaya	Ton	4.160,68	4.297,22	103,28
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	3,00	3,00	100,00
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	2,00	2,00	100,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	2,00	3,74	187,16
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	3,44	15,79	459,01
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	10,00	44,00	440,00
		UPT Balai Benih Ikan					
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1,33	4,66	350,00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	30.000,00	40.000,00	133,33
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	2,00	3,00	150,00



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 04 Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Ton	427,27
		Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Ton	139.331,64

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.044.767.541,00
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp.	1.050.884.000,00
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp.	1.979.223.180,00
4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp.	151.150.100,00
Jumlah	Rp.	9.226.024.821,00

Ranai, 04 Januari 2023

Kepala Dinas Perikanan

Bupati Natuna,


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 9.226.024.821,00 (Sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu) menjadi Rp. 10.582.614.584,00 (Sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh empat) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 26 Oktober 2023


Pihak Kedua,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


Pihak Pertama,
HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERIKANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Ton	427,27
		Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Ton	139.331,64

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	8.047.197.954,00
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp.	1.020.260.750,00
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp.	1.506.116.180,00
4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp.	9.039.700,00
Jumlah	Rp.	10.582.614.584,00


Bupati Natuna

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 26 Oktober 2023
 Kepala Dinas Perikanan


HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Ton	427.27	434.58	101.71
		Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Ton	139,331.64	139,468.64	100.10

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	7,247,746,849.00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	1,530,528,488.00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	1,495,434,806.00
4.	PROGRAM PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	320,195,370.00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023		Rp	10,582,614,584.00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023		Rp	9,514,675,856.00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023			89.91%

Keterangan :

a.	Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2023	Rp	8,047,197,954.00
	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2023	Rp	7,802,017,931.00
	Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2023		96.95%
b.	Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU Tahun 2023	Rp	2,535,416,630.00
	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU Tahun 2023	Rp	1,712,657,925.00
	Persentase Penyerapan		67.55%

Ranai, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS



HADI SURYANTO, S.Pi. M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERIKANAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 26 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya Akuntabilitas Dinas	Nilai Akuntabilitas	Nilai	77
2	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Layanan administrasi umum	%	85
3	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Kehadiran pegawai	%	95

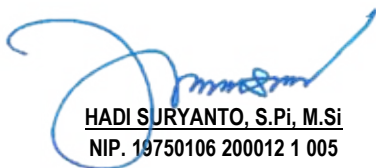
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023

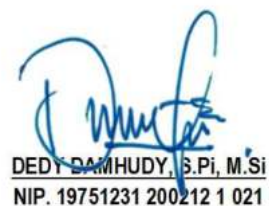
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.047.197.954,00
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 52.100.000,00
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.498.263.804,00
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 761.286.850,00
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 520.200.000,00
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 949.254.233,00
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 266.093.067,00
Jumlah	Rp 8.047.197.954,00

Ranai, 26 Oktober 2023

Kepala Natuna,

Sekretaris,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


DEDY DAMHUDRY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
SEKRETARIAT**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP	Nilai	77	77.75	100.97
2	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	85	100	117.65
3	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Kehadiran pegawai	%	95	98.62	103.81

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023

	Rp	8,047,197,954.00
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8,047,197,954.00
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	52,100,000.00
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5,498,263,804.00
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	761,286,850.00
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	520,200,000.00
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	949,254,233.00
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	266,093,067.00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

	Rp	7,802,017,931.00
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	7,802,017,931.00
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	43,795,092.00
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5,391,011,730.00
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	683,643,580.00
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	490,246,416.00
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	931,762,237.00
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	261,558,876.00

Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023

96.95%

Ranai, 2 Januari 2024

Kepala Dinas

Sekretaris


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAN MANSUR, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 26 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


WAN MANSUR, S.Pi, M.Si
NIP. 19810507 200312 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	135.170,96	Ton
2	Terselenggaranya Pemberdayaan Nelayan kecil	Persentase nelayan terfasilitasi	18,67	Persen

Jumlah Anggaran

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Rp	1.020.260.750,00
Rp	721.406.750,00
Rp	298.854.000,00
JUMLAH	Rp 1.020.260.750,00

Ranai, 26 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


WAN MANSUR, S.Pi, M.Si
NIP. 19810507 200312 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	135,170.96	135,171.42	100.00
2	Terselenggaranya Pemberdayaan Nelayan kecil	Persentase nelayan terfasilitasi	Persen	18.67	28.86	154.58

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Rp 1,020,260,750.00
Rp 1,020,260,750.00
Rp 721,406,750.00
Rp 298,854,000.00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Rp 298,395,503.00
Rp 298,395,503.00
Rp 144,977,760.00
Rp 153,417,743.00

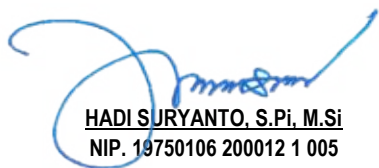
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023

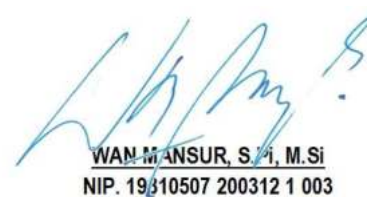
29.25%

Ranai, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


WAN MANSUR, S.Pi, M.Si
NIP. 19310507 200312 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibi, S.Pi,
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan
Budidaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hadi Suryanto, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Natuna,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 10750106 200012 1 005

Ranai, 18 Oktober 2023

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya,


HABIBI, S.Pi
NIP. 19800702 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	4.160,68 Ton
2.	Terselenggaranya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Budidaya yang terbina	8 Kelompok
3.	Tersedianya Sarana Budidaya Perikanan	Jumlah sarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	2 Unit
4.	Tersedianya Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah prasarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	3 Unit

Jumlah Anggaran

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	331.990.000,00
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	976.146.180,00
- Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Rp.	17.980.000,00
Jumlah	Rp.	1,308,136,180,00

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Natuna,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 10750106 200012 1 005

Ranai, 18 Oktober 2023
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya,


HABIBI, S.Pi
NIP. 19800702 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4,160.68	4,297.22	103.28
2.	Terselenggaranya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Budidaya yang terbina	Kelompok	8	21	262.50
3.	Tersedianya Sarana Budidaya Perikanan	Jumlah sarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	Unit	2	2	100.00
4.	Tersedianya Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah prasarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	Unit	3	3	100.00

Program	Pagu	Realisasi	%
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 331.990.000	Rp. 326.542.816	98.36
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 976.146.180	Rp. 941.108.200	96.41
- Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Rp. 17.980.000	Rp. 16.223.000	90.23
Jumlah	Rp. 1.308.136.180	Rp. 1.267.651.016	96.91

Ranai, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Natuna,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 10750106 200012 1 005

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya,


HADI BI, S.Pi
NIP. 19800102 201001 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEUTIA, S.St.Pi**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 26 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


MEUTIA, S.St.Pi
NIP. 19851027 201001 2 024



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	427,27
2	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	3,44
3	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	UPI	2

Jumlah Anggaran

I	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	9.039.700,00
	- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp	9.039.700,00
JUMLAH		Rp	9.039.700,00

Ranai, 26 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


MEUTIA, S.St.Pi
NIP. 19851027 201001 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
TAHUNAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan	Jumlah volume produk olahan perikanan	Ton	427.27	434.584	101.71
2	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	3.44	5.19	150.9
3	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	UPI	2	2	100.00

Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	9,039,700.00	720,000.00	7.96
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	9,039,700.00	720,000.00	7.96
		720,000.00	

Ranai, 30 Desember 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING
PRODUK PERIKANAN


HADI SURYANTO, S.Pi., M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


MEUTIA, S.SiPi
NIP. 19851027 201001 2 024



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FERINA JAYA HAMZAH, S.Pi**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERIKANAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

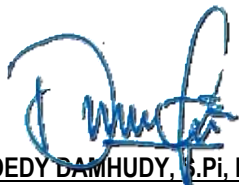
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

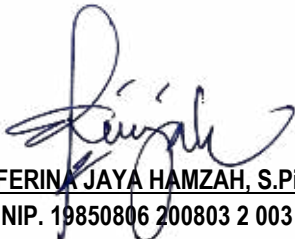
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021


FERINA JAYA HAMZAH, S.Pi
NIP. 19850806 200803 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

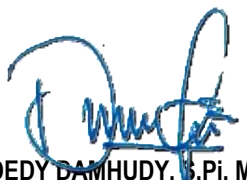
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	3
2	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dinas	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Dokumen	12
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Laporan	1
4	Terlaksananya Penatausahaan Aset Dinas	Jumlah Rekonsiliasi Aset Bulanan	Dokumen	12

Jumlah Anggaran

Ranai, 04 Januari 2023

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN


DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021


FERINA JAYA HAMZAH, S.Pi
NIP. 19850806 200803 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	3	3	100.00
2	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dinas	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Dokumen	12	12	100.00
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Laporan	1	1	100.00
4	Terlaksananya Penatausahaan Aset Dinas	Jumlah Rekonsiliasi Aset Bulanan	Dokumen	12	12	100.00

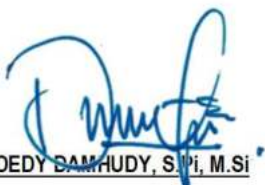
Jumlah Anggaran

-

Ranai, 2 Januari 2024

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN


DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021


FERINA JAYA HAMZAH, S.Pi
NIP. 19850806 200803 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZURAIDA, S.Pi**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERIKANAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021


ZURAIDA, S.Pi
NIP. 19851008 201403 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12
2	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum dan Perkantoran	Dokumen	12
3	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2

Jumlah Anggaran :

-

Ranai, 04 Januari 2023

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


DEDY DAMHUDY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021


ZURAIDA, S.Pi
NIP. 19851008 201403 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	100.00
2	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum dan Perkantoran	Dokumen	12	12	100.00
3	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2	2	100.00

Jumlah Anggaran :

-

Ranai, 2 Januari 2024

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


DEDY DAMHUDRY, S.Pi, M.Si
NIP. 19751231 200212 1 021


ZURAIDA, S.Pi
NIP. 19851008 201403 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
UPTD BALAI BENIH IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARIYANTO, SE.I., M.A.P**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

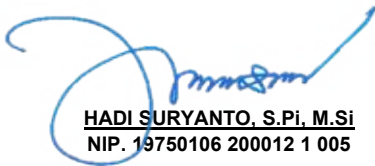
Nama : **HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005

Pihak Pertama,


HARIYANTO, SE.I., M.A.P
NIP. 19780729 200312 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
UPTD BALAI BENIH IKAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Benih Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Beih Ikan	Ekor	25000
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Unit	2

Jumlah Anggaran

-

-

Ranai, 04 Januari 2023

Kepala

Kepala UPTD Balai Benih Ikan


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


HARIYANTO, SE.I., M.A.P
NIP. 19780720 200312 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
UPTD BALAI BENIH IKAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Ketersediaan Benih Ikan Air Tawar	Jumlah Pproduksi Beih Ikan	Ekor	25000	40000	160.00
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Unit	2	2	100.00

Jumlah Anggaran

- 0

Ranai, 2 Januari 2024

Kepala

Kepala UPTD Balai Benih Ikan


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005


HARIYANTO, SE.I., M.A.P
NIP. 19780729 200312 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
UPTD BALAI BENIH IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASAN BASRI**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARIYANTO, SE.I., M.A.P**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,

HARIYANTO, SE.I., M.A.P
NIP. 19780729 200312 1 004

Pihak Pertama,

HASAN BASRI
NIP. 13700918 199703 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN
UPTD BALAI BENIH IKAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunya Bahan Rencana Kerja UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah Bahan Rencana Kerja UPTD BBI	Dokumen	1
2	Tersedianya Laporan UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah Laporan UPTD BBI	Dokumen	16

Jumlah Anggaran

-

-

Ranai, 04 Januari 2023

Kepala UPTD Balai Benih Ikan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan

HARIYANTO, SE.I., M.A.P
NIP. 19780729 200312 1 004

HASAN BASRI
NIP. 19700918 199703 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN
SEKRETARIAT**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tersusunya Bahan Rencana Kerja UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah Bahan Rencana Kerja UPTD BBI	Dokumen	1	1	100.00
2	Tersuedianya Laporan UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah Laporan UPTD BBI	Dokumen	16	16	100.00

Jumlah Anggaran

-

0

-

Ranai, 2 Januari 2024

Kepala UPTD Balai Benih Ikan

HARIYANTO, SE.I., M.A.P
NIP. 19780729 200312 1 004

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan

HASAN BASRI
NIP. 19700918 199703 1 007



**HASIL CAPAIAN DAN TARGET PROGRAM RPJMD 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN PADA TAHUN 2021	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN						TARGET DAN CAPAIAN AKHIR RPJMD		
				2022			2023			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
3.	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN											
3.25.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.045,40	4.106,08	4.264,11	103,85	4.160,68	4.297,22	103,28	21.406,08	8.561,33	39,99
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.632,62	134.481,33	134.874,54	100,29	135.170,96	135.171,42	100,00	683.057,64	270.045,96	39,53
3	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	410,69	418,9	525,95	125,56	427,27	434,58	101,71	1.060,62	960,53	90,56
4	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	18.342	35.000	135.000	385,71	45.000	60.000	133,33	225.000	195.000,00	86,67
5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Orang	130	135	160	118,52	135	229	169,63	725	389,00	53,66
6	Jumlah Diversifikasi Usaha	RTP	105	10	24	240	10	38	380,00	645	62,00	9,61
7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan Yang Operasional	Persen	-	-	-		-	-		-	0,00	
8	Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan	Kelompok	0	5	7	140	5	23	460,00	25	30,00	120



EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi						Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah						
							Rp (Renja)		Rp (P DPA)		I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretaria- tan yang sesuai SOP	Person	90	41.461.448.085	288	6.398.636.724	77	100.000.000	77	52.100.000	0	1.302.835	0	8.121.501	77.75	19.021.535	0	15.349.221	77.75	43.795.092	101	84	366	5.442.431.816	408	16	Dinas Perikanan
		Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilita- s	Predikat/Nilai Akuntabilita- s	81	500.000.000	80.71	31.124.966	77	100.000.000	77	52.100.000	0	1.302.835	0	8.121.501	77.75	19.021.535	0	15.349.221	77.75	43.795.092	101	84	198	74.920.058	196	16	Dinas Perikanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	500.000.000	2	31.124.966	2	50.000.000	2	52.100.000	0	1.302.835	2	8.121.501	0	19.021.535	0	15.349.221	2	43.795.092	100	84	4	74.920.058	33	16	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretaria- tan yang sesuai SOP	Person	90	41.461.448.085	288	13.666.790.155	85	6.297.796.517	85	7.955.097.854	100	1.537.652.847	100	2.024.062.872	100	1.581.223.912	100	2.000.000.000	100	7.768.222.839	118	97	388	21.425.012.994	431	52	Dinas Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	27.431.311.585	4	10.134.602.669	1	5.401.924.317	1	5.498.263.804	1	1.203.416.752	1	1.544.253.047	1	888.091.005	1	1.700.000.000	1	5.391.011.730	100	98	5	15.525.014.399	500	57	Dinas Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	27.431.311.585	303	10.134.602.669	40	5.401.924.317	40	5.498.263.804	41	1.203.416.752	41	1.544.253.047	42	888.091.005	42	1.755.290.920	42	5.391.011.730	88	98	205	15.525.014.399	342	57	Dinas Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Person	90	4.294.136.600	94.17	1.193.121.550	80	688.093.100	80	761.286.850	25.00	99.784.151	80.00	173.958.222	75.00	120.229.895	100	289.071.612	100	683.643.886	125	90	194	1.836.765.130	216	43	Dinas Perikanan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disaksikan	Paket	25	1.080.404.150	2	287.194.431	2	119.000.000	2	104.790.100	0	16.781.050	0	24.971.850	2	23.955.392	2	38.075.600	2	103.783.660	100	99	4	390.978.323	16	36	Dinas Perikanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disaksikan	Paket	2	306.772.000	2	82.892.332	2	63.893.100	2	50.000.000	2	5.287.240	2	11.824.874	2	17.305.210	2	15.499.180	2	49.916.440	100	100	4	132.808.772	200	43	Dinas Perikanan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disaksikan	Dokumen	50	125.800.000	7	30.600.000	10	25.200.000	10	25.200.000	4	1.450.000	13	6.950.000	13	4.200.000	13	10.500.000	13	23.100.000	130	92	20	53.700.000	40	43	Dinas Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	80	2.620.000.000	152.00	752.434.787	80	480.000.000	80	581.296.780	30	76.265.861	34	130.211.498	20	74.768.993	50	225.096.896	134	506.843.248	168	87	286	1.259.278.035	358	48	Dinas Perikanan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disaksikan	Person	85	3.058.000.000	85	307.656.866	78	667.500.000	78	820.200.000	65.11	5.466.165	65.11	1.852.743	90.78	289.736.243	92	193.191.265	90.78	490.246.416	116	94	176	797.933.282	207	26	Dinas Perikanan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disaksikan	unit	350	996.000.000	6	55.910.000	15	216.000.000	15	57.400.000	0	0	0	0	0	55.910.000	13	0	26	55.910.000	173	97	32	111.820.000	9	11	Dinas Perikanan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disaksikan	unit	107	1.500.000.000	8	188.468.866	20	402.500.000	20	388.800.000	0	5.466.165	0	1.852.743	16	170.516.243	12	193.191.265	27	371.026.416	135	96	35	559.493.282	16	37	Dinas Perikanan
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disaksikan	unit	1	25.000.000	15	63.310.000	1	47.000.000	1	74.000.000	0	0	0	0	0	63.310.000	0	0	1	63.310.000	100	88	16	126.620.000	1.600	506	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Person	80	3.917.864.100	96.49	1.674.039.862	77	737.272.200	77	949.264.233	25.00	212.791.693	50.00	248.805.301	78.00	223.883.610	100	246.281.643	100	931.762.237	130	98	195	2.605.801.899	246	67	Dinas Perikanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023



Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah					
							Rp (Renja)		Rp (P DPA)		I		II		III		IV											
1	2	3	4	4A	5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12.180.000	12.00	62.587.250	12	26.400.000	12	57.404.000	3	12.054.250	3	13.187.250	12	54.812.000	100	95	24	117.399.250	200	96	Dinas Perikanan			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disetokan	Laporan	12	319.010.000	12	61.719.000	12	15.000.000	12	8.888.750	3	0	3	147.000	3	1.400.500	100	16	24	63.199.500	200	20	Dinas Perikanan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disetokan	Laporan	40	3.476.854.100	38	1.549.733.412	38	695.872.200	38	882.981.483	40	200.737.433	40	233.856.051	40	2.019.115.360	100	99	78	2.425.283.149	195	70	Dinas Perikanan			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan	Person	80	253.000.000	97.44	397.339.408	77	405.000.000	77	266.093.067	30.38	16.194.096	53.16	55.193.559	84.81	59.283.459	120	98	190	656.898.284	237	260	Dinas Perikanan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disetokan	Unit	48	190.000.000	37	336.140.408	48	190.000.000	48	222.093.067	17	16.794.096	17	43.593.559	34	50.943.459	71	98	71	553.804.284	148	29	Dinas Perikanan			
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	98	16.000.000	0	20.340.000	98	16.000.000	98	24.000.000	7	400.000	25	11.600.000	33	8.340.000	38	100	98	44.305.000	39	295.37	Dinas Perikanan			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2	48.000.000	2	40.850.000	2	200.000.000	2	20.000.000	0	0	-	0	1	19.939.000	50	100	3	60.789.000	150	127	Dinas Perikanan			
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produk Perikanan Tangkap	Person	4.63	11.000.000.000	1.89	1.518.862.257	0.51	400.000.000	0.51	1.020.260.750	(83.28)	62.868.680	(54.28)	24.432.857	(25.60)	20.838.750	0.51	190.255.216	298.395.503	-31.892	29	-161	1.817.257.760	-3.472	17	Dinas Perikanan	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan	Person	22.18	5.250.000.000	11.57	37.596.260	18.47	250.000.000	18.47	721.406.750	0	14.134.260	17.28	8.798.250	25.11	8.270.250	28.46	113.775.000	144.977.765	155	28	40	182.574.020	182	3	Dinas Perikanan	
	Pemeliharaan Fasilitas Nelayan Kecil yang Difaasilitasi Pemerintah dan Pengembangan Kelternbagannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Fasilitas Nelayan Kecil yang Difaasilitasi Pemerintah dan Pengembangan Kelternbagannya	Kelompok	115	1.675.000.000	20.00	37.596.260	20	250.000.000	20	721.406.750	0	14.134.260	-	8.798.250	2	8.270.250	19	113.775.000	144.977.760	100	20	40	182.574.020	35	11	Dinas Perikanan	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Person	0	2.200.000.000	0.00	92.465.443	0	150.000.000	0	298.854.000	0	48.734.420	0	15.634.607	1	12.568.500	0	76.480.216	153.417.743	0	51	1	245.883.186	0	11	Dinas Perikanan	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Laporan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	150.000.000	0.00	92.465.443	1	150.000.000	1	298.854.000	0	48.734.420	0	15.634.607	1	12.568.500	0	76.480.216	153.417.743	100	51	1	245.883.186	100	94	Dinas Perikanan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Person	7.14	6.912.881.422	5.41	2.362.071.688	1.33	1.393.790.711	1.33	1.326.116.180	(83.98)	13.273.800	(50.12)	13.843.625	(12.63)	29.888.175	4.66	1.318.006.410	1.275.625.716	-10.682	98	-137	3.937.697.404	-1.914	53	Dinas Perikanan	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	2.111.000.000	25	30.175.946	14	50.000.000	14	17.980.000	3	4.055.750	7	6.083.625	8	6.083.625	3	0	21	16.223.000	150	90	46	46.398.946	49	2	Dinas Perikanan
	Pemberian Pendampingan, Pengetahuan, Teknologi dan Ref ormasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Men peroleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informas, Serta Penyelenggaraan	Kelompok	34	950.000.000	25	30.175.946	8	50.000.000	8	17.980.000	3	4.055.750	7	6.083.625	8	6.083.625	3	0	21	16.223.000	263	90	46	46.398.946	135	5	Dinas Perikanan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.342.72	4.801.581.422	4.264.11	2.331.595.742	4.160.68	1.343.790.711	4.160.68	1.308.136.180	657.67	9.217.750	1.390.26	7.760.000	1.039.70	23.804.550	706.02	1.318.006.410	1.259.462.716	103	98	8.861	3.991.298.408	197	76	Dinas Perikanan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023



Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah								
								Rp (Renja)	Rp (P DPA)	I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7 x100	14=6+12		15=14/5x100	16									
1	2	3	4	4A	5		6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16												
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	2.231.581.422	1.157.390.147	3	593.790.711	3	331.990.000	0	0	0	7.760.000	0	899.050	3	317.883.768	3	326.542.816	100	98	5	1.483.932.963	33	66	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	1.680.000.000	1.174.505.595	2	750.000.000	2	976.146.180	0	9.217.750	0	18.748.300	0	22.905.500	2	900.736.650	2	951.608.200	100	97	13	2.126.113.795	650	127	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan	Persen	10	5.171.372.133	28.15	249.299.943	2.00	200.000.000	2.00	9.039.700	(92.10)	3.569.500	(70.26)	3.569.500	(22.48)	0	3.74	484.000	(98.21)	7.623.000	-4.911	84	-70	256.922.943	-701	5	Dinas Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	21.05	1.391.372.133	14.12	28.148.770	3.44	200.000.000	3.44	9.039.700	20.00	3.569.500	40.00	3.569.500	57.14	0	15.79	484.000	15.79	7.623.000	459	84	30	35.771.770	142	3	Dinas Perikanan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan an atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	65	1.391.372.133	38.00	28.148.770	10	200.000.000	10	9.039.700	0	3.569.500	8	3.569.500	30	0	0	484.000	44	7.623.000	440	84	82	35.771.770	126	3	Dinas Perikanan
		UTERA ALBENHIK AN																											Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	7.14	2.410.000.000	63.56	263.345.443	1.5	195.000.000	1.5	180.000.000	0	10.017.088	0	21.953.000	6.67	26.033.740	0	54.261.578	6.67	112.265.406	445	62	70	375.610.849	984	16	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi benih Ikan	Ekor	40000	2.410.000.000	30.000	263.345.443	25000	195.000.000	25000	180.000.000	0	10.017.088	0	21.953.000	40.000	26.033.740	54.261.578	40.000	112.265.406	160	62	70.000	375.610.849	175	16	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	1.345.000.000	2	263.345.443	2	195.000.000	2	180.000.000	0	10.017.088	3	21.953.000	0	26.033.740	54.261.578	3	112.265.406	150	62	5	375.610.849	250	28	Dinas Perikanan	

